

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Haris Semendawai dkk. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: LPSK.
- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- A'an Effendi. Freddy Poernomo dkk. 2007. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfitra. 2018. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Denpasar: AB Publisher.
- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif. 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Edita Elda. 2021. *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.
- , 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung : Prakarsa.
- E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Firman Wijaya. 2004. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Henry P Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Janu Murdiyatomoko. 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2017. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- J.E. Sahetapy. 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT Alumni.

- , 2000. *Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia.
- , 1995. *Penyelidikan Dan Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhadar. Edi Abdullah. Husni Thamrin. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Otje Salman. 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan*

- Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.* Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* Bandung : Mandar Maju.
- , 2000. *Perbandingan Hukum Pidana.* Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rahman Amin. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.* Yogyakarta : Deepublish.
- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosikah. Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika.
- R Soesilo. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.* Bandung: Karya Nusantara.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia.
- dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty.
- Surya Jaya. 2010. *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan.* Jakarta: Elsam.

- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Tolib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2008. *The Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*. New York: United Nations.
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Jkt.Pst atas nama Terdakwa Matheus Joko Santoso.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Jkt.Pst atas nama Terdakwa Adi Wahyono.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Jkt.Pst atas nama Terdakwa Juliari Peter Batubara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Jkt.Pst atas nama Harry Van Sidabukke.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Jkt.Pst atas nama Terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28P/HUM/2021.

D. JURNAL

Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra. 2020. Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data sebagai *Vaksin Socio Digital*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Edisi Khusus April 2020*. Universitas Katolik Parahyangan Indonesia.

Claudhya C Coloay. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Lex Crimen Nomor 1 Volume 7 Januari-Maret 2018*.

Edita Elda. 2019. Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, e-ISSN: 2657-0343 Volume 1 Nomor 2 Juli 2019*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139.

Erasmus Napitupulu. 2014. LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi). *Jurnal Perlindungan, Nomor 4 Volume 1, 2014*.

- Bahrudin Machmud. Muhammad Junaidi. Dkk. 2021. Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021*. Semarang : Magister Hukum Universitas Semarang.
- Hariman Satria. 2016. Menakar Perlindungan *Justice Colaborator Quo Vadis Justice Collaborator*. *Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Juni 2016*. Kendari: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.
- Lilik Mulyadi. 2014. Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia di Indonesia Masa Mendatang. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 2 Juli 2014: 101-116*. Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- M. Alfi Syahri. 2018. Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Vol. 3, No. 1*.
- Melani Kartika Sari. 2020. Sosialisasi tentang Pencegahan Covid di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. *Jurnal Karya Abdi: Volume 4 Nomor 1 Juni 2020*, Kediri : Prodi Sarjana Keperawatan Stikes Karya Husada Kediri.
- Rusli Muhammad. 2015. Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol 22 April 2015*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Supriyadi Widodo Ediyono. 2011. Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama. *Jurnal LPSK Volume ke I No.1 Tahun 2011*.
- Srimin Pinem. Dkk. 2023. Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis: Analisa Fenomena Hukum Sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah, Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023*.

Hal: 87-94 P-ISSN: 1693-4458, E-ISSN: 2598-5908, Universitas Medan Area.

E. MAKALAH

- Anne Katharina Zimmerman. 2011. *Securing Protection and Cooperation of Witnesses and Whistle-Blowers: An Overview of the Law as it stands in Germany*. Makalah disampaikan pada UNAFEI *Fourth Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries*, Tokyo. November 2011.
- Fausto Zuccarelli. 2009. *Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice: The European Experience*. (Makalah disampaikan pada UNDP-POGAR *Regional Workshop on Witness and Whistleblower Protection*, Rabat, Maroko, 3 April 2009).
- Indriyanto Seno Adji. 2012. *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Makalah Diskusi Panel Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia*. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indoneisa.
- Mardjono Reksodiputro. 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. 23-124 November 1989. FH Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mas Achmad Santosa. 2011. *Perlindungan terhadap Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*. Makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*. diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta 19-20 Juli 2011.
- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator): Usulan Dalam Rangka*

Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

-----, 2011. *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama*. Makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta 19-20 Juli 2011.

F. TESIS

Hendri Sipayung. 2020. *Pengaturan Tentang Keberadaan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas.

Ihfa Rahmawati. 2020. *Kewenangan Hakim Terhadap Pembatalan Saksi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad Iqbal Lubis. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2223K/Pid.Sus/2012)*. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

G. WEBSITE

CNN Indonesia, *Harry Van Sidabukke Penyuaap Juliari Divonis 4 Tahun Penjara*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505144704-12-638909/harry-van-sidabukke-penyuaap-juliari-divonis-4-tahun-penjara>, diakses Rabu 21 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.

Kompas. Com, *Seperti Prabu yang Dipenjara Musuhnya*, 13-20 Februari 2011, diakses LPSK Ajukan Remisi bagi Agus Condro (kompas.com), pada hari Rabu 14 Desember 2022, pukul 13.00 WIB.

Kompas TV. *Ini 5 Tersangka Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Melibatkan Mensos Juliari*. Minggu 6 Desember 2020,

<https://www.kompas.tv/article/128761/ini-5-tersangka-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-melibatkan-mensos-juliari>, diakses pada Rabu 21 Desember 2022.

Kompas.com. *Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global*. 11 Maret 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?>, diakses Sabtu 10 Desember 2022. Pukul 14.00 WIB.

Institute For Criminal Justice Reform, Promblem dalam Implementasi bagi Justice Collaborator (JC) Indonesia Masih Ditemukan, 1 Juni 2016, <https://icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses pada Selasa 8 Maret 2022.

Media Indonesia. com, *Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Anak Buah Juliari*, Rabu 1 September 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/429702/hakim-kabulkan-permohonan-justice-collaborator-anak-buah-juliari>, diakses pada Rabu 20 April 2022.

Suara.com, *Divonis 4 Tahun Bui, Dalih Hakim Tolak JC Ardian Penyuap Eks Mensos Juliari*, Rabu 5 Mei 2021, <https://www.suara.com/news/2021/05/05/145818/divonis-4-tahun-bui-dalih-hakim-tolak-jc-ardian-penyuap-eks-mensos-juliari>, diakses pada hari Rabu 21 Desember 2022 pukul 15.31 WIB.

H. KAMUS

C.S.T. Kansil. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Bryan A Garner (Ed). 2014. *Black's Law Dictionary Tenth Edition*. United States of America: Thomson Reuters: West Publishing Co.

R. Sutyo Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.

